

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resort Kota Probolinggo

Polres Kota Probolinggo merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Polres Kota Probolinggo merupakan badan pelaksanaan kewilyahan dibawah kepolisian Daerah Jawa Timur. Polres Kota Probolinggo bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum kota Probolinggo

Polres Kota Probolinggo berlokasi di Jl. Dr. Moch Saleh no.34, kelurahan Sukabumi, kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur. Wilayah hukum Polres Kota Probolinggo terdiri dari Kepolisian Sektor (polsek) yang dibawahinya yakni ada 5 polsek, dimana polsek tersebut merupakan kesatuan Polisi yang berada pada wilayah kota. Polsek-Polsek yang dibawahi oleh Polresta Probolinggo tersebut adalah:

1. Polsek Mayangan
2. Polsek Kademangan
3. Polsek Wonoasih

4. Polsek Sumberasih

5. Polsek Wonomerto

6. Polsek Tongas

Keenam polsek tersebut bertugas melaporkan kinerja kepada Polresta Probolinggo, selaku komando atau pimpinan wilayah hukum Kota Probolinggo²⁹.

Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia tentang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian sehingga dapat diciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bisa mencegah terjadinya kriminalitas yang kian hari kian jumlahnya kian bertambah. Menurut G. Gewin memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tugas polisi adalah bagian dari pada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan.³⁰

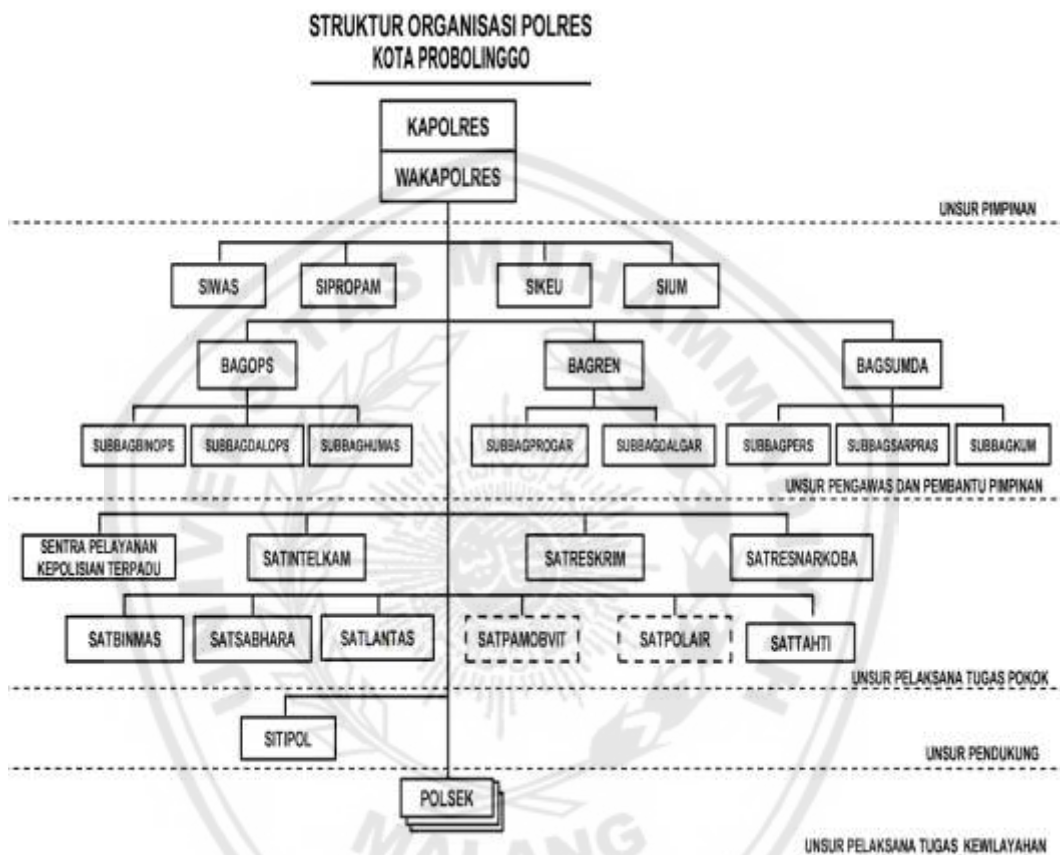
Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat mutlak adalah rasa aman, tentram, dan tertib. Oleh sebab itu tugas polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang mengancam jiwa, badan, harta, kehormatan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi

²⁹ Sumber data: Polres Kota Probolinggo. Tanggal 26 Januari 2017

³⁰ Djoko Prakoso. 1987. POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. PT. Bina Aksara. Jakarta. Hal. 136

di instansi Polres Kota Probolinggo, adanya Struktur Organisasi Polresta Probolinggo dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

BAGAN I



Sumber data: Polresta Probolinggo, tanggal 26 Januari 2017

Di jelaskan juga dalam kinerja Polresta Probolinggo mempunyai VISI dan MISI yang dijalankan agar berpatokan keterapan yang ada.

Visi Polresta Probolinggo

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta melakukan pola-

pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus dan Alpakan yang semakin modern
3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan

Misi Polresta Probolinggo

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana Kepolisian yang modern.
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas SDM Polri yang professional dan kompeten yang menjunjung tinggi etika dan HAM.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada Kepolisian Republik Indonesia.

6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan public melalui sinergitas polisional.
8. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.³¹

B. Gambaran Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pada tahun 2016 SATRESKOBA Kota Probolinggo, yang merupakan satuan khusus dari Polres Kota Probolinggo yang dikhususkan menangani kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika telah menangkap beberapa pengedar narkotika yang berada di Kota Probolinggo.

Kasus-kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang ada di Kota Probolinggo ini, semakin marak dan dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan masyarakat karena berindikasi menimbulkan tindakan-tindakan kriminal.

Penyergapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dilakukan pihak yang berwenang. Dalam hal ini dilakukan oleh SATRESKOBA Kota Probolinggo yang berdasarkan pada KUHAP, Pasal 16, UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Polisi sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.”

³¹ Polresta Probolinggo. “Visi dan Misi” <http://resprobolinggokota.jatim.polri.go.id>. Diakses tanggal 25 Desember 2016, pukul 19.00 WIB

Di kota Probolinggo pelaku rata-rata tidak memiliki pekerjaan , ataupun pelaku merupakan pekerja di tempat-tempat hiburan malam. Hal ini juga merupakan salah satu yang menjadi faktor maraknya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kota Probolinggo.³²

Adapun pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 148 tentang ketentuan pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Pada tahun 2015 hingga September 2016 di wilayah hukum Polresta Probolinggo ada 26 kasus tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Berikut Tabel data kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Probolinggo tahun 2016:

TABEL 1

Tabel Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Probolinggo Tahun 2015 Hingga September 2016.

No	Bulan	2015	2016	Laki--laki	Perempuan
1.	Januari- Juni	12 kasus		10	6
2.	Juli- Desember	4 kasus		4	1

³² Hasil waeancara dengan BRIGPOL AWANG BUDI SETYAWAN, sebagai Anggota SATRESKOBA Polresta Probolinggo. Tanggal 26 Januari 2017

3.	Januari- April		3 kasus	3	2
4.	Mei- September		7 kasus	6	4

Sumber data: Laporan Harian Ungkap Kasus SATRESKOBA Polresta Probolinggo.

Dari tabel diatas dapat dilihat kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang tertangkap oleh SATRESKOBA Kota Probolinggo yang merupakan bagian dari kesatuan Polresta Probolinggo, terlihat bahwa pelaku beragam tidak hanya pria, wanita juga termasuk. Rata-rata pelaku merupakan pengangguran dan pekerja di tempat hiburan malam yang saat ini bertambah dan menjamur di kota Probolinggo.

Menurut hasil wawancara dengan Brigpol Awang Budi Setyawan, pelaku rata-rata mengaku bahwa menjadi pengedar dikarenakan terhimpit faktor ekonomi dan hasil yang menggiurkan dari bisnis narkotika tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan merusak generasi bangsa Indonesia jika jaringan-jaringan perdagangan narkotika tidak ditindak secara tegas karena tidak menutup kemungkinan jika pengedar mengedarkan narkotika pada generasi muda, mengingat akhir-akhir ini pergaulan anak dibawah umur sering kali luput dari perhatian orang tua.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih, merupakan salah satu faktor peredaran narkoba sulit dilacak.³³

Pelaku Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam UU No.35 tahun 2009 pasal 111 sampai dengan 148 BAB XV Ketentuan Pidana. Dalam pasal tersebut dijelaskan ketentuan pidana penjara maupun denda bagi pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh pria maupun wanita serta beberapa faktor penyebab tindakan tersebut adalah tingginya tingkat pengangguran serta menjamurnya tempat-tempat hiburan malam di Kota Probolinggo dan keinginan memperoleh penghasilan banyak tanpa bekerja keras menjerumuskan pelaku untuk mengambil jalan pintas yang melanggar hukum.

Kasus penyalahgunaan narkoba harus diberantas baik oleh pihak berwenang maupun masyarakat sebagaimana juga diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 104 yang berbunyi “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.”

³³ Hasil wawancara dengan BRIGPOL AWANG BUDI SETYAWAN, sebagai Anggota SATRESKOB Polresta Probolinggo. Tanggal 26 Januari 2017

C. Faktor-faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Probolinggo.

Dari hasil penelitian bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di Polresta Probolinggo menurut BRIGPOL Awang Budi Setyawan. selaku anggota penyidik di bagian Satuan Resort Narkoba bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika semakin marak terjadi karena ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.³⁴

1. Faktor meningkatnya Jumlah Pengangguran.

Pengangguran di Kota Probolinggo merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan banyak dari tersangka tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Pencocokan dan Penelitian(Coklit) oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tahun 2008 adalah sebesar 216.833 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 107.569 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 109.264 jiwa.

Adapun rincian data jumlah penduduk angkatan kerja dari tahun 2008 dan 2013 sebagai berikut:

³⁴ Hasil wawancara dengan BRIGPOL AWANG BUDI SETYAWAN, sebagai Anggota SATRESKOBA Polresta Probolinggo. Tanggal 26 Januari 2017

TABEL 2

**Tabel Data Jumlah Persentase Penduduk Kota Probolinggo Yang
Bekerja Dan Pengangguran Tahun 2013**

N=104.886 (2013)

N=113.522 (2015)

No.	Uraian	2013	2015
1.	Bekerja (jiwa)	100.142	107.668
2.	Pengangguran (jiwa)	4.744	5.854
3.	Persentase (%)	4.7%	5.4%

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo³⁵

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2013 dan 2015 jumlah pengangguran di Kota Probolinggo meningkat dari 4.7% pada tahun 2013, menjadi 5.4% pada tahun 2015. Dari data table tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah pengangguran meningkat 0.7% dalam tempo waktu hanya 2 tahun.³⁶

Meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Probolinggo merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan hal ini semakin diperkuat dengan data Laporan Harian Ungkap Kasus SATRESKOBA Polresta Probolinggo, tersangka tindak pidana

³⁵ Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo “Statistik Angkatan Kerja Kota Probolinggo,2013”. <https://probolingkokota.bps.go.id/>. Diakses tanggal 17 April 2017. Pukul 00.10 WIB

³⁶ Databoks. “Data Pengangguran Kota Probolinggo”. <http://databoks.katadata.co.id/>. Diakses tanggal 9 februari 2017. Pukul 00.14 WIB

penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Probolinggo banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja serabutan dan pengangguran. Berikut data dari SATRESKOBA Polresta Probolinggo:

TABEL 3

**Tabel Data Jumlah Persentase Tersangka Penyalahgunaan Narkoba
Yang Bekerja Dan Pengangguran Polresta Probolinggo.**

N: 36

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Bekerja tetap	15	42%
2.	Pengangguran/tidak tetap	21	58%

Sumber data: Laporan Harian Ungkap Kasus SATRESKOBA Polresta Probolinggo.

Berdasarkan uraian data tersebut, faktor dari penduduk yang pekerjaannya tidak tetap/serabutan serta pengangguran, dan keinginan memperoleh uang atau penghasilan banyak tanpa bekerja keras merupakan salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kota Probolinggo. Terlihat dari jumlah dan persentase data table yang dijelaskan di atas.³⁷

³⁷ Hasil wawancara dengan BRIGPOL AWANG BUDI SETYAWAN, sebagai Anggota SATRESKOBA Polresta Probolinggo. Tanggal 26 Januari 2017

2. Faktor Perkembangan Pembangunan Infrastruktur.

Perkembangan pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini lebih ditekankan pada tempat hiburan malam di Kota Probolinggo yang semakin menjamur. Tempat hiburan malam seperti diskotik dan tempat karaoke kerap kali menjadi tempat transaksi narkoba bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, maupun pengaruh pergaulan bebas bagi kalangan remaja yang masih mencari jati dirinya yang menyebabkan generasi penerus bangsa ini terjerumus dalam hal-hal yang negatif.

Pembangunan tempat hiburan, diatur oleh Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pasal 3 tentang jenis Retribusi. Meskipun telah diatur oleh perda, tempat hiburan malam tidak serta merta bersih dari kegiatan-kegiatan transaksi narkoba ataupun tempat para pelaku penyalahgunaan narkoba menggunakan narkoba maupun memanfaatkan untuk bertransaksi.³⁸

Berikut dapat dilihat dari data tersangka yang telah tertangkap oleh SATRESKOB A Kota Probolinggo yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ada beberapa tersangka yang bekerja di tempat karaoke maupun diskotik, bahkan pemandu karaoke di tempat hiburan malam.

³⁸ Perda Kota Probolinggo. "Perda Kota Probolinggo Retribusi Perizinan Tertentu". <http://jdih.jatimprov.go.id/>. Diakses tanggal 9 Februari 2017. Pukul 02.13 WIB.

TABEL 4

**Tabel Data Jumlah Tersangka Yang Tertangkap Di Tempat Hiburan
Malam Maupun Bekerja di Tempat Hiburan Malam.**

N: 36

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Bekerja di tempat hiburan malam	15	41.7%
2.	Tertangkap di tempat hiburan malam	9	25%
3.	Lainnya	12	33.3%

Sumber data: Laporan Harian Ungkap Kasus SATRESKOBA Polresta Probolinggo.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh perkembangan dan pembangunan infrastruktur khususnya dalam hal ini tempat hiburan malam, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Probolinggo. Dapat ditinjau dari jumlah 36 tersangka 41.7% yang terdiri dari 15 bekerja di tempat hiburan malam. Sedangkan 25% terdiri dari 9 tersangka tertangkap di tempat hiburan malam.

Pengawasan orang tua dan orang terdekat yang kurang ketat, serta pergaulan remaja di jaman modern ini terutama di dunia malam semakin

mengkhawatirkan, jika moral penerus bangsa buruk, maka akan melahirkan generasi yang rentan terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika karena mudahnya terpengaruh oleh hal-hal negatif.

D. Upaya-paya Kepolisian Resor Kota Probolinggo Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Probolinggo.

Dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, lembaga atau instansi yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resor Kota Probolinggo, yang sekaligus memiliki peranan dalam penyuluhan langsung kepada masyarakat pada umumnya sesuai ketentuan UU No. 35 tahun 2009 pasal 104 yang berbunyi “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Serta melakukan penindakan, memberi sanksi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak lagi melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang bisa merusak dirinya sendir, serta masa depan bangsa dan negara.

Masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum sehingga terciptanya ketaatan dan ketentraman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum ini merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diterapkan. Indikator-indikator dari kesadaran hukum tersebut adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.

Pelaksanaan penyuluhan oleh pihak kepolisian Polresta Probolinggo ini lebih memfokuskan mengenai bahaya dari Narkotika yang dapat merusak masa depan diri sendiri maupun generasi bangsa Indonesia. Dalam rangka mencegah terjadinya Penyalahgunaan Narkotika yang pernah dilakukan, pihak Polresta Probolinggo tidak dapat berjalan sendirian, melainkan membutuhkan dukungan, kerjasama, dan sinergi dari berbagai lembaga yang peduli terhadap nasib dan masa depan bangsa dan Negara Indonesia

Dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Polres Kota Probolinggo melakukan 2 upaya yaitu:.

1. Upaya Preventif

Penanggulangan secara preventif terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindakan untuk menjauhi Narkotika dan jangan sampai terjerumus oleh Narkotika. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak sampai melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Preventif dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Upaya ini agar penyuluhan dapat dilakukan di intansi-intansi pemerintahan daerah, dengan harapan penyuluhan lebih efektif diperlukan andil dari pemerintah daerah salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata. Salah satu kegiatan yang dilakukan dengan bekerja

sama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Probolinggo.

Polres Probolinggo Kota SATRESKOBA melakukan sosialisasi bekerja sama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Probolinggo terhadap Biker / Club sepeda motor yang ada di Kota Probolinggo (08/04/17). Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Kantor Walikota Probolinggo. Brigpol Ach. Fauzan anggota SATRESKOBA Polres Probolinggo Kota memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba terhadap generasi muda serta macam-macam jenis / bentuk narkoba. Penyuluhan dilanjutkan oleh unit Binmas Polres Probolinggo Kota yang disampaikan oleh Kasat Binmas AKP Suharsono, memberikan penyuluhan terhadap *Club* sepeda motor yang ada di Kota Probolinggo mengajak para generasi muda untuk turut serta membantu dalam lingkungan sekitar serta memberikan informasi kepada Polri apabila ada masalah gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas).³⁹

b. Melakukan Koordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Hal ini dilakukan agar pendekatan penyuluhan secara sosial budaya dan agamis dapat berjalan efektif. Sejauh ini koordinasi ini

³⁹ Polres Kota Probolinggo. "Street Save Jilid II". <http://www.polresprobolinggokota.info/>. Diakses tanggal 28 April 2017. Pukul 00.09 WIB.

dilakukan saat adanya acara keagamaan dan acara-acara yang di adakan masyarakat di lingkungan Kota Probolinggo.

Seperti acara yang di sebut “Dloul” atau pengajian membaca sholawat dengan syair-syair yang hampir setiap minggunya diadakan di setiap daerah kota Probolinggo secara bergiliran. Pada kegiatan ini pihak kepolisian bekerja sama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk sembari melakukan sosialisasi anti narkoba. Kegiatan ini juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian Polsek mayangan di bantu warga sekitar dan panitia.rekayasa lalu lintas pun juga di lakukan guna lancarnya kegiatan serta memudahkan bagi jamaah.⁴⁰

c. Melakukan kerja sama dengan TNI

TNI yang merupakan pihak berwenang dalam menjaga keutuhan NKRI, tentunya sangat penting melakukan koordinasi tentang penyuluhan bahaya penyalahgunaan Narkotika yang mengancam generasi penerus bangsa ini, seperti yang telah dilakukan TNI mendukung anti Narkotika dengan memasang spanduk-spanduk Anti Narkotika dan turut serta bekerja sama dalam kampanye anti Narkotika yang dilakukan Polresta Probolinggo.

⁴⁰ Polresta Probolinggo. “Kegiatan Dloul dan sosialisasi anti narkoba”. <http://www.polresprobolinggokota.info/>. Diakses tanggal 28 April 2017. Pukul 00.45 WIB

Kegiatan sosialisasi tentang Narkoba dan bahaya Narkoba yang telah dilakukan salah satunya membantu Pihak Polresta probolinggo khususnya SATRESKOBA Kota Probolinggo dalam mengamankan jalannya kegiatan “Street Save Jilid II” yang di selenggarakan Polresta Probolinggo yang diikuti seluruh *club* Motor di Kota Probolinggo pada tanggal 8 April 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Kantor Walikota Probolinggo.

d. Melakukan sosialisasi di Sekolah

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Kota Probolinggo di sekolah yang berada di kota Probolinggo ialah melakukan upacara bendera setiap 1 bulan, 1 kali dengan materi bahaya tentang narkoba. Dan pada 7 April 2017 salah satunya melakukan penyuluhan anti Narkotika di SMK SORE Kota Probolinggo secara langsung memberi materi dengan memanfaatkan jam istirahat siswa. Dalam kegiatan tersebut SATRESKOBA Kota Probolinggo melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan mempersilahkan guru ataupun siswa yang ingin bertanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Diharapkan dari kegiatan ini, upaya pencegahan dapat

terlaksana dengan baik agar tidak merusak generasi penerus bangsa.⁴¹

2. Upaya Represif

Penanggulangan secara represif adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memberantas atau menindak dengan tegas khususnya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sudah terjadi, yang mana tindakan ini ditunjukan pada pelaku. Tindakan-tindakan yang tepat dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara represif yaitu:

- a. Penanggulangan dan kemudian dilakukan penahanan terhadap pelaku. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan tidak dibenarkan dilakukan secara sewenang-wenang, harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam KUHAP No. 8 tahun 1981.
- c. Penuntutan terhadap pelaku berdasarkan undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009 yang berlaku.
- d. Pemeriksaan pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam KUHAP.

⁴¹ Hasil wawancara dengan BRIGPOL AWANG BUDI SETYAWAN, sebagai Anggota SATRESKOBA Polresta Probolinggo. Tanggal 21 April 2017.

- e. Penjatuhan vonis terhadap pelaku oleh hakim yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan vonis berupa pidana berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya represif yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindarkan orang-orang terdekat terjerumus dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Kota Probolinggo. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana.⁴²

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan dirinya sendiri serta bangsa Negara mengingat penyalahgunaan narkoba termasuk Organisasi Kejahatan *Trans* Nasional yang merupakan ancaman utama bagi negara, sehingga pelaku tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁴³

⁴² Hasil wawancara dengan BRIGPOL AWANG BUDI SETYAWAN, sebagai Anggota SATRESKOB Polresta Probolinggo. Tanggal 26 Januari 2017

⁴³ A. Kadarmanita. *Op cit.* 2010 "Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment". <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>. Diakses tanggal 13 September 2016, pukul 23.30 WIB

E. Kendala-kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kota Probolinggo Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Probolinggo.

Menurut hasil wawancara dengan Brigpol Awang Budi Setyawan, Anggota SATRESKOBA Kota Probolinggo, mengungkapkan;

1. Penggunaan dan peredaran Obat bebas yang mengandung Prekursor Narkotika.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang menjelaskan jika tersangka penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

“Prekursor Narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat (2) UU Narkotika).

Kendala yang sulit diatasi adalah peredaran prekursor Narkotika, karena masih ada obat bebas yang mengandung salah satu zat prekursor Narkotika, sehingga jika dikonsumsi melebihi dosis yang dianjurkan, akan menimbulkan efek yang sama dengan mengkonsumsi Narkotika itu sendiri. Mengingat di Kota Probolinggo marak penggunaan obat bebas yang mengandung salah satu zat Prekursor narkotika untuk tujuan diluar kegunaan obat tersebut. Karena obat bebas tersebut, penjualannya tidak diawasi dengan ketat sehingga sangat muda bagi pelaku penyalahgunaan prekursor narkotika untuk mendapatkannya di toko-

toko kecil selain apotek dan toko khusus obat yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

2. Kendala menjamurnya tempat hiburan malam di Kota Probolinggo.

Memang dalam hal tempat hiburan malam di Kota Probolinggo jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kota-kota besar. Di Probolinggo terdapat 5 tempat hiburan malam, 3 tempat karaoke dan 2 diskotik. Namun hal ini merupakan salah satu kendala bagi Kepolisian Resor Kota Probolinggo karena tempat hiburan malam mini telah mendapat izin berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pasal 3 tentang jenis Retribusi.

3. Pelaku yang melarikan diri ke luar pulau Jawa.

Hingga saat ini, jika terdapat jaringan pelaku yang berhasil melarikan diri ke luar pulau Jawa maka dapat menyulitkan petugas dalam pencarian dan penyelidikan serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangkap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Sulit jika hanya mengandalkan Kepolisian selaku salah satu pihak yang berwenang menangani kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Maka peranan dari masyarakat juga sangat penting, mengingat hal ini juga diatur oleh undang-undang yaitu UU No. 35 tahun 2009 pasal 104 yang berbunyi “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta

membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”⁴⁴



⁴⁴ Hasil wawancara dengan BRIGPOL AWANG BUDI SETYAWAN, sebagai Anggota SATRESKOBA Polresta Probolinggo. Tanggal 26 Januari 2017